

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH PADA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

WILLY TRISTIONO
NPM: 1502110204



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

WILLY TRISTIONO
NPM : 1502110204

Dengan judul:

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 2020

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

**Ketua Program Studi
Akuntansi**

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak.CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak.CA
NIK: 19711019 200405 1 001

Pembimbing II

Elviza, SE, M.Si.
NIK: 19840405 201112 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

WILLY TRISTIONO

NPM : 1502110204

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH 2020**

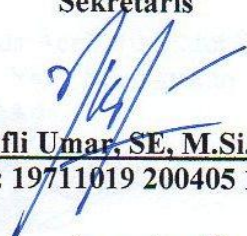
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 7 februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001

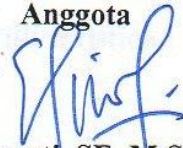
Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

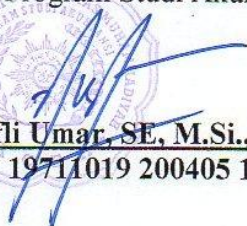
Anggota


Elviza SE, M. Si.
NIK: 19840405 201112 001

Anggota


Eva Susanti, SE, M.Si., Ak
NIK: 19760202 200607 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si., Ak. CA
NIK: 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan



Willy Tristiono

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Willy Tristiono**
NPM : 1502110204
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Willy Tristiono

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Pada Tahun 2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Selaku

pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Ibu Elviza, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi.....	7
2.1.2 Tujuan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi	10
2.1.3 Komponen Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi	12
2.1.4 Kinerja Pemerintah	14
2.2 Penelitian Sebelumnya	16
2.3 Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	22
3.1.1. Tujuan Penelitian	22
3.1.2. Jenis Penelitian.....	22
3.1.3. Horison Penelitian.....	23
3.1.4. Unit Analisis.....	23
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.3 Teknik Analisis Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1 Profil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	26
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	27
4.1.3 Tugas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	28
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	31
4.2. Hasil Penelitian.....	51

4.2.1 Pengukuran Kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	32
4.2.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Sarana Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	33
4.2.3 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	34
4.3. Pembahasan	38
4.3.1 Capaian Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	38
4.3.2 Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	40
4.3.3 Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.....	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA..... 47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Sebelumnya	18
Tabel 4.1	Perjanjian kinerja tahun 2020 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	37

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Pemikiran.....	21
-----------	-------------------------	----

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS REGISTRASI
KEPENDUDUKAN ACEH PADA TAHUN 2020**

**WILLY TRISTIONO
NPM: 1502110204**

Pembimbing I : Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA

Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi kinerja pemerintahan pada Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh telah dilaksanakan secara efektif karena Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh selaku salah satu instansi pemerintah provinsi Aceh telah diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaan evaluasi tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan banyak faktor penghambat seperti kemampuan SDM yang masih rendah. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah menyusun dokumen penetapan kinerja tahun 2020 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dengan memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan, dan jumlah anggaran.

Kata Kunci: *Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kinerja Pemerintah*

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEMS PERFORMANCE OF GOVERNMENT INSTITUTIONS AT
THE REGISTRATION OFFICE ACEH POPULATION IN 2020**

WILLY TRISTIONO
NPM: 1502110204

Advisor I : Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA

Advisor II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the government's performance accounting information system at the Aceh Population Registration Service. The analytical model that will be used is descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field which is focused on the effectiveness of the government's performance accounting information system. The results showed that the government performance accounting information system at the Aceh Registration and Population Service had been implemented effectively because the Aceh Registration and Population Service as one of the Aceh provincial government agencies had been implemented in accordance with applicable guidelines, although in the implementation of the evaluation it could not be implemented. maximally, this is due to many inhibiting factors such as the low capacity of human resources. The Aceh Population Registration Service has compiled a performance determination document for 2020 by referring to the Regulation of the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 29 of 2010 concerning guidelines for preparing performance determination and accountability reporting on the performance of government agencies that will be accounted for at the end of each fiscal year by including strategic targets, performance indicators , targets, programs/activities, and the amount of the budget.

Keywords: Effectiveness of Government Performance Accounting Information System

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Paradigma atau pandangan masyarakat umumnya membentuk suatu pengertian tertentu dalam dinamika perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan dapat mengembangkan prinsip atau pengertian tertentu menjadi lebih luas atau lebih rinci. Paradigma baru di dalam masyarakat modern antara lain: adanya keterbukaan (*transparansi*), peningkatan efisiensi, tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Paradigma tersebut mendorong adanya reformasi manajemen keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah serta dikeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Perlu diterapkan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/ daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perkembangan era globalisasi mendorong teknologi informasi semakin meningkat pesat di segala bidang. Setiap organisasi harus mampu mengikuti perkembangan ini untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Teknologi sangatlah berpengaruh dan menjadi faktor utama yang paling berperan dalam menentukan kinerja organisasi. Banyak penemuan-penemuan yang telah memberikan dampak sangat besar yang dapat mempermudah aktivitas manusia baik secara kelompok maupun individu. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan beralihnya penggunaan sistem informasi yang manual ke sistem informasi yang berbasis komputer.

Penerapan dan pemanfaatan sistem informasi telah menjadi alat utama untuk menghadapi persaingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada setiap daerah untuk melaksanakan anggarannya secara tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan bermanfaat.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005).

Reformasi birokrasi telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam manajemen keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dengan didukung pesatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi, manajemen pemerintahan perlu diperbaharui agar dapat sejalan dengan perubahan lingkungan ekonomi global. Kemajuan teknologi yang secara luas diterjemahkan sebagai cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan telah dan akan terus menjadi faktor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di setiap lapisan masyarakat

Sistem informasi yang memadai di suatu organisasi dapat mendukung dan membantu manajemen dalam penyediaan informasi. Kemampuan manajer organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Informasi tersebut seperti laporan keuangan organisasi, untuk menghasilkan informasi akuntansi dibutuhkan sistem informasi akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) mempunyai fungsi yang penting didalam bidang akuntansi, karena akuntansi mendukung dan membantu manajemen dalam penyediaan informasi. Kemampuan manajer untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif memerlukan informasi akuntansi sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan alokasi dan laporan keuangan organisasi, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan sistem informasi akuntansi (Santi, 2018). Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan organisasi melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan informasi yang dihasilkan. SIA mampu memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga memungkinkan organisasi mencapai keunggulan kompetitif. Salah satu komponen dari sistem informasi akuntansi yaitu teknologi. Hadirnya teknologi, dapat membantu manajer dalam kegiatan organisasi atau pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Pekerjaan akuntan dalam menghasilkan informasi keuangan dan informasi non keuangan saat ini relatif mudah dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi baik itu komputer maupun telekomunikasi. Sistem informasi akuntansi mencakup penggunaan teknologi informasi untuk menyediakan informasi bagi pengguna. Adanya jaringan komputer juga membantu akuntan karena sistem informasi akuntansi pada organisasi besar, menengah menggunakan jaringan komputer sebagai jaringan bagian integral dari sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, jaringan komputer kebutuhan informasi dari pemakai sistem informasi akuntansi tersebut dapat dipenuhi dengan lebih cepat, akurat dan risiko kesalahan yang relatif kecil. Selain itu, jaringan

komputer juga dapat risiko pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang relatif dapat dikurangi.

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bahwa tidak semua pegawai mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu atau sesuai dengan target, disebabkan karena rendahnya kemampuan pegawai dalam menggunakan *software/ hardware* dengan tepat dan memanfaatkan sesuai dengan tugas untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencapai efektivitas sistem informasi akuntansi, salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pengguna seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kemampuan kerja serta pengetahuan. Pengguna informasi yang tingkat pengetahuan pegawai yang rendah dalam bidang komputer akan berdampak terhadap kinerja yang kurang baik, karena pengguna kurang menguasai penggunaan sistem berbasis komputer. Sehingga sejumlah transaksi yang diproses kurang efektif dan tidak sesuai dengan tujuan, yang akan menyebabkan hasil laporan tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan target. Hal itu akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat pengetahuan pemakai dan akan menurunkan penggunaan sistem informasi akuntansi serta dapat menurunkan kinerja pegawai Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Kinerja Pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2020.”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait serta langsung didalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis di bidang keuangan khususnya mengenai Efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah
- b. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen Pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini di batasi pada efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi dan Efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakai. Beberapa sarjana sosial seringkali meninjau Efektivitas dari sudut kualitas kehidupan pekerja (orang yang melakukan suatu tindakan). Rumusan mengenai Efektivitas kegiatan atau program bergantung pada masalah, seberapa berhasilnya pencapaian sasaran yang dinyatakan.

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006, efektif diartikan sebagai pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2016:24). “Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi Efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa Efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. Kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut.

Efektivitas pengelolaan anggaran daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan dalam APBD (Trianto, 2017:5). Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Murni, 2018:6). Pengertian Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung dari pada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan.

Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut (Ahadi, 2018:3). Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai

dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2017:8).

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu tujuan perencanaan telah dicapai. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan (Putu, 2017). Umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi, tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Sedarmayanti (2016:12) mengatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Leitch dan Davis, (2018;14) mengatakan bahwa Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat

manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Romney (2016:473) mengatakan SIA adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi organisasi.

Mulyadi (2016:3) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi. Dari definisi sistem informasi akuntansi tersebut, unsur pokok suatu sistem informasi akuntansi adalah formulir, catatan, serta laporan keuangan.

Handoko (2018:124) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Jumali (2018:85), mengemukakan bahwa secara umum, efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut. Data dalam sistem informasi tersebut seharusnya merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit organisasi atau organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam organisasi.

2.1.2 Tujuan Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas berasal dari kata efektif merupakan pencapaian tujuan yang tepat dengan melakukan sebuah pilihan yang tepat dari serangkaian alternatif untuk pengambilan sebuah keputusan, sedangkan efektivitas memiliki pengertian

berhasil atau tepat guna dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum sistem yang efektif didefinisikan sebagai sistem yang dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi, sehingga diharuskan kepada setiap sistem untuk dapat memberikan pengaruh positif kepada pemakainya. Setelah suatu sistem dioperasikan selama beberapa waktu, perlu dilakukan penelaahan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan apakah sistem tidak dapat dipakai lagi atau dapat dilanjutkan, dan apabila telah dilanjutkan, apakah perlu dilakukan modifikasi agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan lebih baik. Sinonim untuk sukses, karena menjadi sarana yang efektif untuk mencapai hasil dan perencanaan awal (Ramezan, 2018).

Organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis dalam Puspitawati dan Anggadini, (2018; 14) sebagai berikut: “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.”. Romney (2016:473) mengatakan SIA adalah sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk persiapan informasi keuangan dan informasi yang diperoleh dari mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi perusahaan.

Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi pemakai akuntansi yaitu pihak luar (ekstern) organisasi organisasi dan pihak dalam(intern) organisasi organisasi. Kebutuhan para pemakai ekstern dapat dipenuhi dengan adanya publikasi laporan laba/rugi. Sedangkan para pemakai intern dapat memenuhi kebutuhan informasi akuntansinya untuk mencapai nilai ekonomis (laba) organisasi semaksimal mungkin. Definisi SIA dari Hall (2018:6) adalah sub bagian khusus dari sistem informasi yang memproses transaksi keuangan. Sistem

informasi akuntansi (SIA) memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kegiatan organisasi sehari-hari
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen
3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggung jawaban.

Sistem informasi akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengiktisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi usaha. Sistem informasi akuntansi berkembang melalui suatu proses yang terdiri dari tiga tahap yang sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan perusahaan. Menurut Hall (2018:6) tahap-tahap tersebut adalah :

1. Analisis sistem

Analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan para pihak yang menggunakan informasi tentang perusahaan dan menentukan bagaimana menyediakan informasi tersebut.

2. Desain sistem

Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif perencanaan rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai untuk dipertimbangkan. Sistem informasi akuntansi dirancang sedemikian rupa sesuai hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan, sehingga sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pemakai.

3. Implementasi sistem

Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah tahap implementasi. Selama tahap implementasi berlangsung, analisis sistem melakukan dokumentasi perubahan-perubahan yang dilakukan untuk menyempurnakan sistem, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem, dan sistem oleh pemakai informasi.

2.1.3 Komponen Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Romney (2016:3) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen:

1. Orang-orang, yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data, tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. *Software*, yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi jaringan.

Romney (2016:12) menyatakan bahwa terdapat delapan unsur dari sistem informasi akuntansi yaitu :

1. Tujuan
Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang menggambarkan tenaga penggerak dibelakang sistem dan tujuan nya.
2. Masukan
Data harus dikumpul dan dimasuk kan sebagai input dalam sistem. Masukan yang umum dari suatu sistem informasi akuntansi adalah data transaksi dan jurnal.
3. Keluaran
Informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut keluaran. Keluaran yang umum dari SIA adalah laporan keuangan dan laporan-laporan internal seperti daftar piutang dagang, anggaran, dan proyeksi cashflow.
4. Penyimpanan data
Data disimpan dalam sistem informasi akuntansi untuk pemakaian berikut nya. Data yang disimpan harus diperbaharui secara teratur.
5. Pengolahan
Data harus diolah untuk menghasilkan informasi. Sebagian organisasi memproses data menggunakan komputer.
6. Instruksi dan prosedur
Sistem informasi akuntansi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur secara rinci. Instruksi dan prosedur untuk pemakai biasanya terdapat pada prosedur manual.
7. Pengguna
Orang-orang yang berhubungan dengan sistem dan pemakai informasi yang dihasilkan disebut pengguna yang meliputi semua orang yang melaksanakan dan mencatat semua transaksi serta semua orang yang mengatur dan mengendalikan sistem.
8. Pengendalian dan pengukuran konsumen
Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi dari akses-akses yang tidak sah. Pengendalian dan pengukuran konsumen dibuat dalam suatu sistem informasi akuntansi untuk menjamin informasi yang akurat dan pengoperasian sistem secara tepat.

2.1.4 Kinerja Pemerintah

Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian atau target, pelaksanaan program, usaha, dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau organisasi. Pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan melihat dampak penggunaan sistem informasi terhadap efektivitas penyelesaian tugas membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakainya lebih produktif dan kreatif (Chandra, 2017:4). Istilah kinerja (*performance*) identik dengan prestasi kerja, yang artinya sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dengan jelas *output* yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Kinerja pegawai akan menunjuk pada efektivitas kerja pegawai, dimana hal ini akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan (Syahrani, 2018:3).

Kinerja adalah merupakan perwujudan hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu kinerja merupakan sasaran penentu dalam mencapai tujuan organisasi, tetapi hal ini tidak mudah dicapai, karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang (Irawan, 2018:4). Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Kinerja

yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. (Mangkunegara, 2016:16).

Berdasarkan beberapa kajian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

Kinerja individu pegawai adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan berhasil dan efisien pada suatu organisasi. Kinerja yang baik akan terlihat jika individu dapat menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. (Alannita, 2018:6). Kinerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kecakapan dan motivasi. Kecakapan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kecakapan, keduanya tidak dapat menghasilkan keluaran yang tinggi. Larsen dan Mitchell mengusulkan bahwa kinerja akan tergantung kepada adanya perpaduan yang tepat antara individu dan pekerjaannya (Sedarmayanti, 2016: 215-216).

Kinerja individu pegawai adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan berhasil dan efisien pada suatu organisasi (Suryawan, 2018:6). Kinerja individu pegawai adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi bergantung kepada bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memonitoring dan

membantu proses kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga tersebut (Suryawan, 2018:6).

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja-kemampuan mereka, motivasi dan dukungan yang diterimanya, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan hubungan mereka dengan organisasi. Untuk mengukur keberhasilan suatu sistem sulit dilakukan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah karena peneliti ingin membandingkan perbedaan dan persamaan antara hasil-hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang akan dilakukan sekarang ini salah satunya dilakukan oleh Mamujaja (2016) dengan judul Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. Pengendalian intern pada Pemerintah Pusat dan daerah berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pada kinerja Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas DISPENDA Kota Manado telah efektif dan memadai.

Penelitian dari Parnami (2018) dengan judul Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dimana skala likert adalah sebagai alat ukur. Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Efektivitas sistem informasi akuntansi

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali termasuk ke dalam kriteria Efektif (KE) dimana jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu variabel keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan fisik, kualitas informasi, dan teknologi informasi sebagian besar responden menyatakan sangat efektif.

Kemudian penelitian dari Wartini (2016) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. Penelitian ini dilaksanakan pada 38 SKPD Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sampel penelitian terdiri dari 114 orang pegawai yang terlibat langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif dan tehnik Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana tergolong efektif. Kualitas sistem dan kualitas informasi signifikan berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan pengguna dan secara tidak langsung signifikan berpengaruh terhadap keuntungan/manfaat sistem bagi organisasi melalui intervening kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dan motivasi manajemen signifikan berpengaruh secara langsung terhadap manfaat sistem bagi organisasi.

Selanjutnya penelitian dari Pusata (2017) dengan judul penelitian “Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tejakula. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menentukan efektivitas sistem informasi akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula berada pada kriteria efektif.

Kemudian penelitian dari Dewi (2017) dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Buleleng 45. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45 yang berhubungan dengan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer sebanyak 30 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan pengukuran skala likert dengan menggunakan SPSS 17.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45 sudah efektif, dimana penilaian aspek keamanan data berada dalam kriteria efektif, penilaian aspek waktu berada dalam kriteria efektif, penilaian aspek ketelitian berada dalam kriteria efektif, penilaian aspek variasi laporan berada dalam kriteria efektif, penilaian aspek relevansi berada dalam kriteria efektif, dan penilaian aspek kenyamanan fisik berada dalam kriteria sangat efektif. Untuk lebih jelas penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya

No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado (Mamuaja, 2016)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas DISPENDA Kota Manado telah efektif dan memadai.	– Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	– Tempat penelitian – Analisis data – Teknik pengumpulan data

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali (Parnami, 2018)	– Metode Kualitatif	Hasil analisis bahwa Efektivitas sistem informasi akuntansi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali termasuk ke dalam kriteria Efektif (KE) dimana jika dilihat dari masing-masing variabel yaitu variabel keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan fisik, kualitas informasi	– Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	– Tempat penelitian – Analisis data – Teknik pengumpulan data
3	Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana (Wartini, 2016)	– Metode Kualitatif	Hasil analisis menunjukan bahwa SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana tergolong efektif. Kualitas sistem dan kualitas informasi signifikan berpengaruh secara langsung terhadap kepuasan pengguna dan secara tidak langsung signifikan berpengaruh terhadap keuntungan/manfaat sistem bagi organisasi melalui intervening kepuasan pengguna.	– Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	– Tempat penelitian – Analisis data – Teknik pengumpulan data

Tabel 2.1 Lanjutan

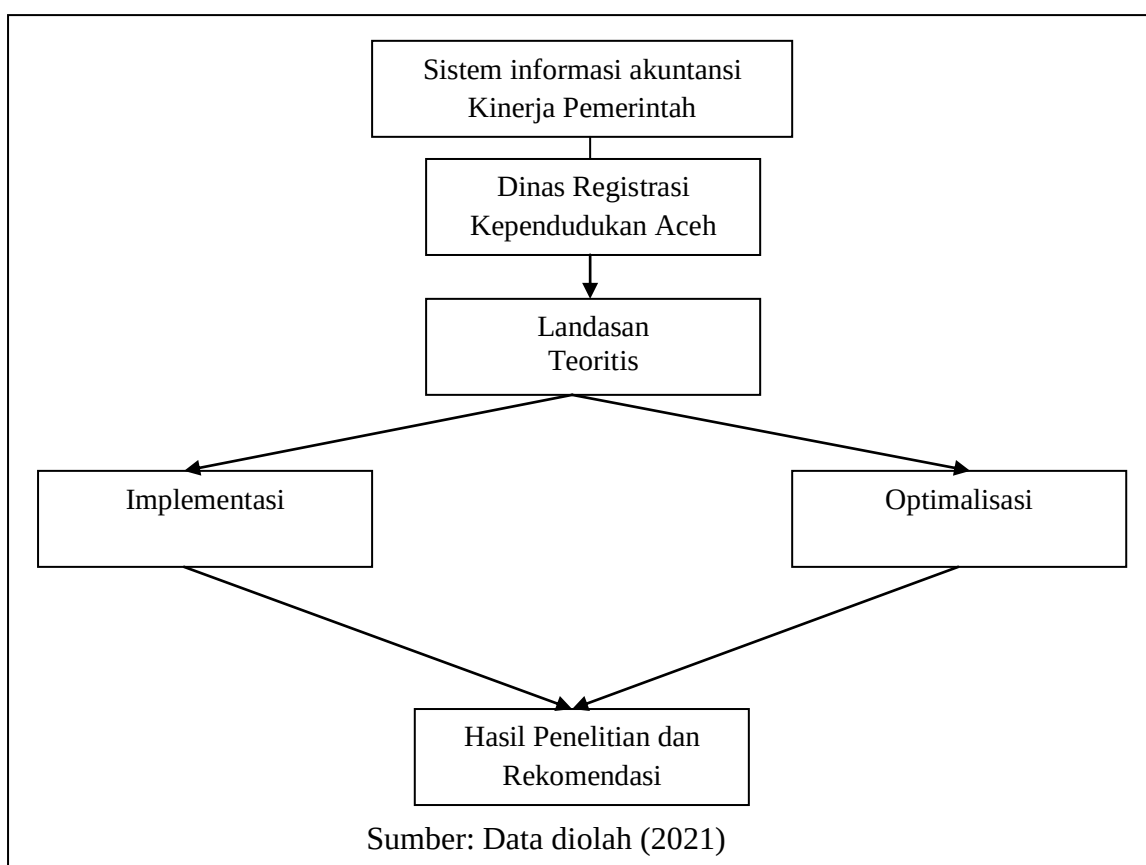
No	Judul dan nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tejakula (Pusata, 2017)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tejakula berada pada kriteria efektif. Hal ini dapat dilihat dari perolehan masing-masing aspek, yaitu aspek kinerja memiliki kriteria efektif sebesar 982, aspek informasi memiliki kriteria efektif sebesar 728, aspek ekonomis memiliki kriteria efektif sebesar 505.	– Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	– Tempat penelitian – Analisis data – Teknik pengumpulan data
5	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Buleleng 45 (Dewi, 2017)	– Metode Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis komputer pada Bank Perkreditan Rakyat Buleleng 45 sudah efektif, dimana penilaian aspek keamanan data berada dalam kriteria efektif, penilaian aspek waktu berada dalam kriteria efektif.	– Sama-sama meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	– Tempat penelitian – Analisis data – Teknik pengumpulan data

2.3 Kerangka Pemikiran

Efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data

elektronik, kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu.

Kerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang Implementasi dan Optimalisasi sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam meningkatkan kualitas kerja pemerintahan. Dengan adanya kerangka konseptual ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana penelitian merupakan program menyeluruh dari penelitian meliputi hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian ini mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai kepada analisis data, sedangkan struktur penelitian adalah rencana kerja yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu;

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

3.1.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang akan

dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi, realitas lapangan penelitian. Observasi dalam penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

3.1.3. Horizon Waktu

Horizon waktu penelitian ini merupakan penentuan target penelitian dalam waktu jangka pendek. Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai. Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah *one shot* atau *cross sectional*, yaitu horizon waktu yang mengumpulkan data penelitian hanya dalam sekali kumpul.

3.1.4. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Unit analisis Individual adalah data yang dikumpulkan dari setiap individu unit. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi dua orang maka dikenal sebagai unit analisis pasangan (*dyads*). Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Peneliti memutuskan unit analisis bahkan saat merumuskan pertanyaan penelitian karena metode pengumpulan data ditentukan oleh tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data yang terbagi atas berbagai macam, meliputi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah dan belum diolah oleh pihak lain, yang termasuk data primer adalah data tentang laporan realisasi anggaran belanja.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah. Dari data yang diperoleh dari kantor Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Teknik Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian Lapangan (*Fild Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

- a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pimpinan untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

- b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat prosedur yang terjadi.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisa yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2017:21) adalah sebagai berikut: “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Untuk mendapatkan data mengenai efektivitas penerapan sistem informasi akuntansi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh penulis langsung melakukan interview atau wawancara langsung pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berdasarkan beberapa pertanyaan. Hasil penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam mengenai Efektivitas sistem informasi akuntansi kinerja pemerintah sebagai *bentuk* pencarian data dan dokumentasi langsung lapangan yang kemudian peneliti analisis

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA) lahir setelah melewati serangkaian proses pembahasan yang panjang, baik oleh eksekutif maupun legislatif. Sejalan dengan keinginan untuk menghasilkan data administrasi kependudukan yang berkualitas di Aceh, Qanun Nomor 8 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh lahir. Menurut qanun tersebut, dinas ini mempunyai fungsi, antara lain pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Aceh (KIA), penetapan sistem penomoran registrasi penduduk Aceh, perlindungan dan pemeliharaan kerahasiaan data penduduk Aceh, hingga koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan dan antar kabupaten.

Registrasi penduduk adalah pencatatan terhadap setiap peristiwa kependudukan yang terjadi setiap saat. Registrasi penduduk pada dasarnya melakukan pencatatan terhadap komponen-komponen kependudukan yang bersifat dinamis. Komponen-komponen tersebut, antara lain kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan, perubahan tempat tinggal dan sebagainya.

Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA). Tugas Pokok Dinas Registrasi dan Kependudukan

Aceh melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk menyelenggarakan pendataan dan pemutakhiran data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan akurat.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Aceh”. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh merupakan Perangkat Daerah di Bidang Kependudukan dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi Pemerintah Aceh. Visi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang ditetapkan adalah “Terwujudnya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima menuju penduduk aceh berkualitas ”. Kata kunci dari Visi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah:

1. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
3. Pelayanan Prima di bidang administrasi kependudukan merupakan pelayanan yang diberikann Kepala/Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara cepat, tepat, efektif, efisien,

murah dan memuaskan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, akuntabilitas, transparansi serta penegakkan hukum dan HAM.

4. Penduduk berkualitas adalah penduduk yang sadar akan hak dan kewajibannya untuk memiliki dokumen kependudukan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

Sedangkan Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan, dan Misi dapat berjalan secara kongkret dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan kependudukan Aceh dan catatan sipil sebagai dasar perencanaan, perumusan, kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan penduduk Aceh.
2. Memfasilitasi kebutuhan pelayanan kependudukan Aceh dan catatan sipil di setiap Kabupaten/Kota agar terwujudnya sistem yang terintegrasi.
3. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan pelayanan kependudukan Aceh dan catatan sipil Aceh.
4. Menjadikan pusat data dan informasi kependudukan dan catatan sipil di Aceh.
5. Membangun koneksi database kependudukan Aceh dan catatan sipil setiap saat dengan Kabupaten/Kota sehingga menghasilkan informasi kependudukan dan catatan sipil secara cepat, tepat, dan akurat.

4.1.3 Tugas Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran dekonsentrasi;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah;
4. Pengelolaan urusan ASN;
5. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
6. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
7. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota;
8. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
9. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
10. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

11. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
13. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
14. Pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta penerapan untuk kegiatan administrasi kependudukan
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
16. Pembinaan UPTD; dan
17. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh didukung oleh 81 orang pegawai yang sebagiannya menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi sebagaimana tertera pada lampiran.

Struktur Organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 116 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengeolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Bidang Kelembagaan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Sekretariat Dinas Registrasi Kependudukan membawahi antara lain:
 - a. Sub bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum b
 - b. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - 2) Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk membawahi antara lain:
 - a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dan

- c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk.
- 3) Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil membawahi antara lain:
 - a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil
 - b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi antara lain
 - a. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Bina Administrator Database (ADB)
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 5) Bidang Kelembagaan membawahi Antara lain :
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengukuran Kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Pengukuran kinerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sarana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan strategi. Pengukuran

kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan rencana kinerja (performance plan) dengan realisasi kinerja (Performance result).

Pengukuran kinerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

4.2.2 Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Sarana Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dalam rencana kinerja Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, selain penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, ditetapkan juga indikator kinerja kegiatan dan target-targetnya. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dengan kategori pengelompokan sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Indikator Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

- c. Indikator Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Indikator Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian manfaat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Indikator Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosil, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

4.2.3 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh dan program yang direncanakan pada tahun 2020, maka instansi pemerintah harus menggunakan indikator masukan (*inputs*) antara lain sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana. Dari penggunaan *inputs* tersebut diatas, Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh merencanakan dapat menghasilkan sejumlah produk sebagai *output* (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa “setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk

dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh disusun mengacu pada Qanun tentang RPJM Aceh. Dalam garis besar dapat disampaikan bahwa Rencana Strategis Dinas Registrasi Kependudukan Aceh secara Implisit didalamnya terjabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja. Jika dapat mengukur kinerja, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh akan dapat mengerjakan tugas-tugas secara baik dan lebih berhasil.

Jadi, secara konseptual, indikator kinerja adalah alat penting dalam membangun sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2020 sesuai dengan RPJM Pemerintah Aceh.

Perjanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diwujudkan dalam dokumen penetapan kinerja yang berisikan janji yang akan dicapai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan Gubernur Aceh antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perjanjian kinerja tahun 2020 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota.	- Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota. - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota.	94 % 85 %
2.	Meningkatnya Kualitas Database dan Informasi Kependudukan yang Akurat.	- Persentase Pelaporan dan Informasi Kependudukan di Provinsi Aceh. - Persentase Pengelolaan Database dan Pelayanan Data Kependudukan.	100 % 100 %
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK oleh SKPA.	- Persentase 4 Instansi/SKPA yang melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. - Persentase 3 Instansi/ SKPA yang terkoneksi dengan Data	100 % 100 %

Sumber: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga sasaran strategis dan enam indikatornya pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2020 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dengan indikator cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten/Kota dan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota. Kemudian meningkatnya kualitas database dan informasi kependudukan yang akurat dengan indikator persentase pelaporan dan informasi kependudukan di Provinsi Aceh. Persentase pengelolaan database dan pelayanan data kependudukan. Selanjutnya meningkatnya pemanfaatan data kependudukan berbasis nik oleh SKPA dengan indikator Persentase 4 Instansi/SKPA yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Persentase 3 instansi/ SKPA yang terkoneksi dengan data base kependudukan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Capaian Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah menyusun dokumen penetapan kinerja tahun 2020 dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dengan memuat sasaran strategis, indikator Kinerja, Target, Program/Kegiatan, dan jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 RPJM Pemerintah Aceh.

Hasil pencapai dari indikator tahun 2020 pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah dengan indikator cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten/Kota dengan target 94% dapat dijelaskan bahwa dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab/Kota se-Aceh saat ini terus melakukan pelayanan perekaman KTP Elektronik langsung turun ke gampong-gampong untuk pencapaian target yang telah ditentukan. Saat ini kepemilikan KTP-El telah mencapai 99,49% dari target realisasi 95% di tahun 2020 sesuai dengan dengan target yang harus dicapai 99% di akhir kerja yang ditentukan didalam RPJMA (Hasil capaian Kepemilikan KTP El Berdasarkan Jenis Kelamin di Aceh Tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran). Jika dilihat berdasarkan pencapaian terget Kepemilikan KTP elektronik di Aceh sudah mencapai 99, 49% dari 100%

masyarakat Aceh harus memiliki KTP Elektronik, masih ada sekitar 0,51% masyarakat Aceh belum memiliki KTP Elektronik/ memegang KTP Elektronik. Perekaman di daerah terpencil, tertinggal dan terluar juga menjadi salah satu program dan kegiatan yang ditargetkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan ditahun 2021 guna mengejar ketertinggalan masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Ikut terlibat dalam kegiatan Bansos yang dilakukan oleh pemerintah Aceh setiap tahun juga upaya yang sangat efektif untuk membuka perekaman Dokumen Kependudukan di kegiatan tersebut, masyarakat langsung mendapatkan dokumen kependudukan.

Kemudian indikator mengenai cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota dengan target 85% dapat dijelaskan bahwa Tahun 2020 dari target 86% Aceh sudah mencapai 87,03% anak dari usia 0-18 mendapatkan akta kelahiran, atau sebanyak 1.623.818 orang anak aceh sudah memiliki akta kelahiran dari total 1.865.796 anak. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2020, Anak Aceh yang berusia 0-18 Tahun belum mendapatkan akta kelahiran sebesar 241.978 Anak atau sebesar 12,97% yang masih belum memiliki akta kelahiran dari usia 0-18 Tahun (Hasil capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota).

Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran ini karena aktifnya Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang konsen terhadap hal ini. Kerjasama seluruh dinas terkait, masyarakat dan lembaga swasta lainnya juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kepemilikan akta kelahiran ini. Kemudahan dalam pengurusan dan terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk akta kelahiran ini sangat membantu

masyarakat untuk memiliki akta kelahiran, seperti, jika ibu melahirkan dirumah sakit maka pada saat ibu pulang dari rumah sakit maka akta kelahirannya telah selesai dan bisa dibawa pulang sekalian juga. Hadirnya Petugas Registrasi Gampong di beberapa Kabupaten/Kota juga sangat membantu para orang tua yang memiliki bayi berusia 0-5 tahun dalam mendapatkan dokumen akta kelahiran.

4.3.2 Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Sebelum melakukan analisis, maka perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan analisis. Analisis adalah suatu aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu atau juga melakukan suatu evaluasi terhadap pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sehingga akan diketahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa penyebab keberhasilan pelaksanaan target/realisasi kinerja yaitu:

1. Adanya peningkatan kapasitas, pemahaman aparatur terhadap tupoksinya dan semangat dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas - tugas.
2. DRKA telah melakukan fungsinya dalam hal pembinaan, fasilitasi dan supervisi terus menerus kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas, keterampilan aparatur dan lainnya yang menunjang pekerjaan
3. Kegiatan pemutakhiran data yang terus menerus dilakukan sehingga DRKA dapat menyediakan data kependudukan dan pencatatan sipil yang dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh.
4. Adanya kerjasama dengan dinas/instansi lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat seperti kerjasama dalam

penyelenggaraan sidang itsbat nikah, perjanjian kerjasama kependudukan dalam rangka pemanfaatan data kependudukan sehingga SKPA yang memerlukan data dapat mengakses secara online.

5. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah untuk dapat mencetak KTP-El di daerah tanpa harus menunggu hasil cetakan dari pusat sehingga kepemilikan KTP-El mulai meningkat walaupun DRKA tidak melakukan pencetakan tapi memfasilitasi untuk pengambilan blangko dipusat dan fasilitasi dalam hal lainnya.

Selain keberhasilan terdapat juga kegagalan atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan KTP. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pencetakan KTP telah dapat dilakukan di daerah, tapi untuk bangkunya tetap dari Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Dalam pendistribusian inilah yang menjadi kendala bagi daerah sehingga sering terlambat pencetakan karena tidak ada blangko.

Penyebab terputusnya blangko ada beberapa hal seperti, jumlah yang dibutuhkan tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pusat, kurangnya anggaran untuk menjemput blangko tersebut. Hal ini berpengaruh juga terhadap jumlah kepemilikan KTP. Akhir tahun, belum seluruhnya SKPA menindaklanjuti surat tentang perjanjian kerjasama dalam rangka pemanfaatan data kependudukan yang bersumber dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), sehingga diakhir tahun hanya Badan Pengelolaan Keuangan Aceh yang telah mulai menggunakan data dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berusaha untuk melakukan berbagai hal seperti fasilitasi, pembinaan dan supervisi agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat tanpa kendala dan data kependudukan semakin valid sehingga dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan dan lainnya. Komunikasi yang kontinyu antara provinsi dengan daerah dan sebaliknya serta komunikasi dengan pusat sangat diperlukan untuk dapat mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DRKA dan Disdukcapil maka diharapkan lebih memahami tugasnya sebagai abdi negara yang dilakukan melalui berbagai macam pelatihan/bimtek, workshop, sosialisasi dan rakor. Hal lainnya dalam rangka mendukung program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) maka DRKA terus berbenah baik dalam hal peralatan, sumber daya manusia maupun datanya, untuk pemanfaatan data diperlukan suatu mekanisme yang terukur yang dilakukan melalui perjanjian kerjasama (PKS). Selain itu Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga melakukan kerjasama dengan dinas/instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik dengan pusat maupun Disdukcapil dalam segala hal seperti kevalidan data dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan dokumen kependudukan lainnya

4.3.3 Pencapaian Pernyataan Kinerja pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun 2020 melaksanakan 5 Program rutin yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan 1 Program Spesifik yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Semua

program di atas telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam rangka menunjang kinerja yang telah ditetapkan.

Hal yang perlu ditingkatkan terus yaitu hal-hal yang terkait dengan pencatatan sipil (Capil) baik itu berupa sosialisasi tentang akta kematian, akta kelahiran dan kepemilikan kartu tanda penduduk dan juga kartu identitas anak (KIA). Bidang Pendaftaran Penduduk dengan mengakses tingkat penduduk rentan, membangun kerjasama dengan lintas sektor dalam hal menjaring penduduk rentan agar mendapatkan identitas dan mudah dilakukan pendataan, sehingga semakin besar tingkat kesadaran masyarakat yang mengurus dan memiliki dokumen administrasi kependudukan maka semakin besar juga pelayanan dan layanan yang didapatkan oleh masyarakat dalam hal mengurus keperluan.

Dalam hal ini pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan juga melakukan upaya inovasi melalui Petugas Registrasi Gampong dalam hal kepengurusan dokumen administrasi kependudukan, yang kemudian melahirkan sebuah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong. Selain melahirkan upaya Pergub tentang percepatan pelayanan, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga melakukan dorongan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota di mas Pandemi Covid-19 pelayanan Online dokumen Kependudukan.

Pada tahun 2020 ini, Dinas Registrasi Kependudukan mulai terus berbenah untuk data kependudukan, antara lain dengan meningkatkan aparatur yang ahli dibidang IT maupun data melalui pelatihan-pelatihan, membangun system untuk mengkoneksikan dengan berbagai SKPA agar data Dinas Registrasi Kependudukan dapat diakses by system. Sosialisasi, rapat-rapat telah dilakukan untuk menunjang hal ini. Begitu juga dengan perjanjian kerjasama (PKS) yang

ditargetkan pada tahun 2020 sebanyak 4 PKS dan di akhir tahun Dinas Registrasi Kependudukan mencapai PKS dengan SKPA dilingkungan pemerintah aceh sebanyak 26 PKS, bahwa kesadaran SKPA dilingkungan pemerintah aceh sudah mulai menggunakan data satu pintu dalam berbagai keperluan pelayanan yang dilakukan. Pada tahun 2020, Dinas Registrasi Kependudukan juga menerbitkan buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh yang berisi tentang data informasi penduduk Aceh baik dari segi kuantitas penduduk maupun kualitas penduduk, mobilitas penduduk dan juga tentang kepemilikan dokumen kependudukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi kinerja pemerintahan pada Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh telah dilaksanakan secara efektif karena Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh selaku salah satu instansi pemerintah provinsi Aceh telah diselenggarakan sesuai dengan pedoman yang berlaku, walaupun dalam pelaksanaan evaluasi tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan banyak faktor penghambat seperti kemampuan SDM yang masih rendah.
2. Tiga sasaran strategis dan enam indikator Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tahun 2020 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota dengan indikator cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten/Kota dan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten/Kota. Kemudian meningkatnya kualitas database dan informasi kependudukan yang akurat dengan indikator persentase pelaporan dan informasi kependudukan di Provinsi Aceh. Persentase pengelolaan database dan pelayanan data kependudukan. Selanjutnya meningkatnya pemanfaatan data kependudukan berbasis nik oleh SKPA dengan indikator Persentase 4 Instansi/SKPA yang melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan. Persentase 3 instansi/ SKPA yang terkoneksi dengan data base kependudukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan kepada Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh sebagai berikut:

1. Disarankan agar Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh dapat meningkatkan kemampuan SDM baik pihak evaluator maupun pihak yang dievaluasi. Dengan mengadakan sosialisasi, workshop dan pelatihan kerja dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur.
2. Disarankan agar Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh agar dapat memberikan kesadaran masing-masing instansi pemerintah Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh untuk mengimplementasikan kinerja secara lebih baik sehingga evaluasi bukan hanya ditunjukan pada keberadaan renstra tetapi juga pemanfaatan renstra itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi Nopri, (2017). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru
- Alannita. (2018). Analisis Kinerja Aparatur Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat” Kecamatan Mamuju serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Mamuju. *Jurnal Manajemen*
- Azlin, N. (2018). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*. Pekanbaru.
- Chandra, K. A. (2017) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Keahlian Pengguna, Kepercayaan, Kesesuaian Tugas, Dan Partisipasi Manajemen Terhadap Kinerja Individu (Studi Pada Perusahaan Asuransi Surakarta). *Artikel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta*
- Dewi, Putri. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Buleleng 45. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 07 Nomor 01*
- Hall dan Singleton (2018) *Information Technology Auditing and Assurance*. edition. Jakarta: Salemba Empat
- Hall, James. (2016), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keempat, Salemba. Empat, Jakarta.
- Handoko (2018), *Manajemen Personalia*, Yogyakarta. BPFE
- Herry, (2017). *Akuntansi Jasa dan Dagang* : jogjakarta Gava Media.
- Irawan, Bambang (2018) Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Manajemen Universitas Mulawarman Samarinda*
- Mamuaja, Brejita. (2016). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA 165 Vol.4 No.1*
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2016). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: rafika ADITAMA
- Mulyadi (2016). *Sistem Akuntansi*. Edisi ke tiga. Jakarta : Salemba Empat.

- Murni, Sri (2018) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Parnami, Nadi. (2017). Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.(3), 370-378
- Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang *Efektifitas*
- Pusata, Muhammad. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Tejakula. *ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi Volume: 10 No: 2*
- Ramezan, Majid. (2018). Measuring The Effectiveness of Human Resource Information Systems In National Iranian Oil Company (An Empirical Assessment). *Dalam Iranian Journal of Management Studies*, 2(2): h:129-145.
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Salman Jumali, (2016), *Kepercayaan Terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru Dalam Evaluasi Kinerja Individual*, SNA VIII Solo, 15 – 16 September, 2018. Universitas Jambi.
- Saputra, Ginting. (2017). Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Komputer Di Alfa Mart. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.(3)*, 753-765
- Sari, Desti (2017) *Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengendalian Persediaan Barang Dagang Pada CV. Graha Gallery Palembang*. *Jurnal Akuntansi*
- Sedarmayanti. (2016). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sekaran, Umar. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryawan, I. K. (2018) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23. No, 2*.

- Syahrani (2018). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform*, 2018, 2 (3): 1624-163
- Trianto, A. (2017) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Umar, Husein (2018) *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Wartini, Ni Nengah. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana No. 5, Vol. 5*
- Zukhri, Ahadi. (2018). Efektivitas Penerapan SIA Berbasis Komputer dengan Pendekatan DBMS pada KSP Asri Sari Utama Mandiri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol: 4 No: 1*